

Anggaran di Tiga SKPD Disorot

● Ganjar Panggil Bawahannya

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah akan mendalami lebih lanjut laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran 2014.

Pemeriksaan lebih mendalam tersebut dilakukan atas permintaan DPRD.

Ada tiga satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang mendapat sorotan tajam terkait pelaksanaan kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014 senilai Rp 174 miliar. Hal itu mencuat saat rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng dengan BPK, Senin (22/6). Ketiganya Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru), dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi menjelaskan, alasan permintaan pemeriksaan lebih mendalam karena BPK tidak menerima data kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014. Selain itu kegiatan tersebut dinilai dilakukan tidak pada saat keadaan darurat/bencana. "Kami perlu mendapat penjelasan dari BPK."

Kemarin, Gubernur Ganjar Pranowo langsung bersikap dengan meminta keterangan bawahannya, sekitar pukul 10.00, di ruang kerjanya. Kepala Dinas PSDA Jateng, Prasetyo Budi saat dikonfirmasi mengakui dipanggil gubernur untuk dimintai keterangan terkait kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014 di dinasnya. "Saya diundang gubernur untuk dimintai keterangan apa saja kegiatan yang masuk dalam mendahului APBD Perubahan 2014," katanya.

Sangat Mendesak

Dinas PSDA Jateng mengakui adanya penggunaan anggaran itu sebesar Rp 4,932 miliar. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat

tingkat kepentingannya sangat mendesak. "Ini kegiatan di luar program, jika tidak dilakukan akan berdampak lebih luas," terangnya.

Dijelaskan, kegiatan tersebut mencakup perbaikan di 15 titik yang tersebar di enam kabupaten yakni Kudus, Klaten, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Pekalongan. Selain itu ditambah satu titik perbaikan di Sungai Bodri, Kendal. "Perbaikan di antaranya berupa menutup tanggul jebol, dan tebing yang akan longsor. Dilakukan pada Agustus-Desember 2014," tuturnya.

Kepala Dinas Bina Marga Jateng, Bambang NK menyatakan, jika kegiatan yang dilakukan pihaknya tidak mendahului APBD Perubahan 2014. Meski lelang kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014, namun pelaksanaannya dilakukan setelah Per-

da APBD Perubahan 2014 terbit.

"Ini bukan kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014. Kontrak juga ditandatangani 3 September 2014 dengan 100 hari kerja. Total anggaran yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Jateng adalah Rp 179 miliar, dari yang semula direncanakan Rp 232 miliar," paparnya.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng selama ini baru pada permukaannya saja. Pemeriksaan menggunakan metode berbasis risiko, dengan memperhatikan risiko kontrol.

"Mungkin saja ada pekerjaan yang tidak terkena sampel pemeriksaan oleh BPK, karena kami tidak mungkin memeriksa seluruh pekerjaan. Apalagi waktu pemeriksaan BPK hanya 30 hari."

Hery menegaskan, jika pemeriksaan ingin lebih mendalam, maka harus ada pemeriksaan yang lain. "Harus ada revisi objek pemeriksaan," jelasnya.

Meski akan ada pemeriksaan lebih lanjut, BPK tidak berani memastikan apakah pemeriksaan ini akan mengubah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Jateng. "Tergantung hasil pemeriksaan," imbuhnya. (J8,H81-90)



Sorotan Anggaran Pemprov Jateng

Dinas PSDA Jateng (Rp 4,932 miliar)

Nilai Anggaran : Rp 174 miliar

- **Keperluan:** perbaikan menutup tanggul jebol dan tebing yang akan longsor di 15 titik Kudus, Klaten, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Pekalongan, dan Sungai Bodri (Kendal).
- **Waktu:** Agustus-Desember 2014

Dinas Bina Marga Jateng

- **Keperluan:** lelang proyek (pelaksanaan setelah Perda APBD Perubahan 2014 terbit)
- **Nilai anggaran:** Rp 179 miliar dari rencana Rp 232 miliar

sumber diolah dari wawancara (J8-)